



Marginalisasi dan Diskriminasi Pasukan Inong Bale (Perempuan Ex-Kombatan) Pascakonflik dan Perdamaian Aceh

Musdawati, Sykur Zil Ikram

Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry

Banda Aceh

Musda.wati@ar-Raniry.ac.id,

2303050009@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Konflik bersenjata di Aceh yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade telah memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat, terutama perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran perempuan, khususnya pasukan Inong Bale dalam konteks konflik dan pascakonflik di Aceh. Meskipun perempuan berkontribusi secara aktif dalam gerakan Aceh Merdeka (GAM), mereka sering kali terpinggirkan dalam proses perdamaian dan rekonstruksi. Kajian ini mengidentifikasi kesenjangan literatur yang ada, di mana kontribusi perempuan pascakonflik jarang diakui. Selain itu, banyak kajian yang cenderung maskulin dan mengabaikan peran perempuan sebagai agen perubahan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis bagaimana konstruksi gender di masyarakat Aceh berpengaruh pada marginalisasi perempuan pascakonflik. Temuan penelitian ini menunjukkan, bahwa meskipun perempuan berperan sebagai pelaku dalam konflik, norma gender yang berlaku dalam masyarakat menghambat pengakuan terhadap kontribusi mereka. Penelitian ini merekomendasikan perlunya inklusi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan pascakonflik untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Aceh.

Kata Kunci: Perempuan, Konflik, Aceh, Inong Bale, Konstruksi Gender, Perdamaian

Pendahuluan dan Latar Belakang Masalah

Konflik bersenjata yang terjadi di Aceh selama lebih dari tiga dekade, yang dikenal sebagai konflik Aceh, telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah dan struktur sosial masyarakatnya. Konflik ini dimulai pada tahun 1976 dengan berdirinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menuntut kemerdekaan Aceh dari Indonesia. Selama periode ini, masyarakat Aceh mengalami berbagai bentuk kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakstabilan yang berkepanjangan. Meskipun dampak konflik dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, namun perempuan mengalami dampak yang berbeda dan sering kali lebih berat (Djalal, 2010).

Perempuan di Aceh, khususnya mereka yang terlibat dalam gerakan GAM, memainkan peran yang signifikan selama konflik. Banyak perempuan yang bergabung dengan GAM, baik secara sukarela maupun karena dorongan



situasi. Menurut data yang ada, sekitar 20% dari anggota GAM adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menjadi korban, tetapi juga aktor aktif dalam perjuangan (Siregar, 2015). Beberapa perempuan bergabung karena mengikuti suami mereka, sementara yang lain tergerak oleh penderitaan masyarakat akibat konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh keluarga mereka. Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya berperan sebagai pendukung, tetapi juga sebagai penggerak perubahan.

Namun, meskipun kontribusi perempuan dalam gerakan GAM sangat signifikan, mereka tidak mendapatkan pengakuan yang setara dalam proses perdamaian. Ketika perundingan damai antara GAM dan TNI berlangsung pada tahun 2005, perempuan tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Pimpinan GAM pada saat itu bahkan menyangkal keberadaan perempuan dalam gerakan, yang menunjukkan adanya diskriminasi gender yang mendalam (UN Women, 2015). Akibatnya, setelah perdamaian, posisi perempuan kembali terpinggirkan. Mereka dipaksa untuk kembali ke peran tradisional sebagai anak, istri, dan ibu yang berakibat pada hilangnya ruang publik di mana mereka aktif terlibat selama konflik.

Dalam kajian konflik di Aceh, terdapat kesenjangan literatur yang signifikan terkait dengan perempuan sebagai Inong Bale. Isu ini jarang mendapat tempat dalam penelitian, dan kajian-kajian tentang kontribusi perempuan dalam gerakan Aceh Merdeka nyaris tidak ada. Banyak kajian konflik yang cenderung maskulin, menitikberatkan bahwa konflik adalah fenomena yang didominasi oleh laki-laki yang mengabaikan segala aspek tentang perempuan dan pengalaman hidupnya. Secara umum, dalam konteks konflik, perempuan sering dipandang hanya sebagai korban, sementara laki-laki dianggap sebagai pelaku. Namun, dalam konteks Aceh, narasi ini tidak sepenuhnya akurat. Perempuan juga berperan sebagai pelaku dalam konflik, tetapi kontribusi mereka sering kali tidak diakui karena bertentangan dengan norma gender yang berlaku (Zainuddin, 2018).

Caroline Moser, dalam karyanya tentang gender dan konflik, menekankan pentingnya memahami peran perempuan dalam konteks konflik dan pascakonflik. Moser berargumen bahwa perempuan tidak hanya berfungsi sebagai korban, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif dalam proses perdamaian dan rekonstruksi (Moser, 2001). Pendapat ini sejalan dengan pandangan para ilmuwan feminis lainnya yang menekankan perlunya mengakui kontribusi perempuan dalam konflik dan pentingnya inklusi mereka dalam proses pengambilan keputusan (Cockburn, 2007; Enloe, 2014).

Kembali ke posisi domestik ini tidak hanya mencerminkan pengabaian terhadap kontribusi perempuan selama konflik, tetapi juga menunjukkan adanya konstruksi gender yang kuat di masyarakat Aceh. Masyarakat patriarkal yang telah ada sebelum konflik kembali menguat, dan perempuan diharapkan untuk kembali ke peran tradisional mereka. Diskriminasi yang dialami oleh perempuan pascakonflik mencakup berbagai aspek, mulai dari akses terhadap pendidikan, pekerjaan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Artikel ini bertujuan untuk membahas diskriminasi yang dialami oleh perempuan pasukan Inong Bale pascakonflik dan perdamaian di Aceh. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana konstruksi gender yang ada di masyarakat Aceh berkontribusi terhadap marginalisasi perempuan, serta bagaimana perempuan dapat berjuang untuk mendapatkan kembali hak dan posisi mereka dalam masyarakat. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan dan perdamaian di Aceh.

Kajian Pustaka

Konflik bersenjata sering kali dipandang sebagai fenomena yang didominasi oleh laki-laki, di mana perempuan sering kali dianggap sebagai korban yang pasif. Namun, kajian feminis menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berfungsi sebagai korban, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif dalam konteks konflik dan perdamaian. Caroline Moser dan Cynthia Enloe adalah dua tokoh penting dalam kajian gender dan konflik yang memberikan wawasan mendalam tentang peran perempuan dalam situasi konflik. Dalam kajian ini, kita akan mengeksplorasi konsep kunci dalam gender dan konflik serta menghubungkannya dengan konteks marginalisasi perempuan dalam konflik di Aceh.

Moser (2001) menekankan bahwa perempuan memiliki peran yang kompleks dalam konflik. Mereka tidak hanya menjadi korban kekerasan, tetapi juga berkontribusi dalam berbagai cara, baik sebagai pejuang, pendukung, maupun penggerak perubahan. Dalam konteks Aceh, perempuan yang tergabung dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menunjukkan bahwa mereka berani mengambil peran aktif dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Moser juga menggarisbawahi pentingnya memahami bagaimana konflik memengaruhi perempuan secara berbeda dibandingkan laki-laki, baik dalam hal pengalaman maupun dampak yang ditimbulkan.

Konstruksi Gender

Konstruksi gender adalah konsep penting dalam kajian gender yang menjelaskan bagaimana norma dan nilai sosial membentuk peran dan harapan terhadap laki-laki dan perempuan. Enloe (2014) berargumen bahwa konstruksi gender ini sering kali mengabaikan kontribusi perempuan dalam konflik, sehingga mereka terpinggirkan dalam narasi sejarah. Dalam konteks Aceh, norma patriarkal yang kuat mengakibatkan perempuan sering kali dianggap tidak layak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam konteks konflik maupun pascakonflik.

Pada sisi lain marginalisasi perempuan dalam konflik dan perdamaian merupakan salah satu isu penting dalam banyak konflik di dunia. Marginalisasi perempuan dalam konteks konflik merujuk pada pengabaian terhadap kontribusi dan kebutuhan perempuan dalam proses perdamaian dan rekonstruksi. Moser (2001) menunjukkan, bahwa meskipun perempuan berperan aktif dalam konflik, mereka sering kali tidak diakui dalam proses perdamaian. Hal ini juga terlihat dalam konteks Aceh, di mana perempuan yang terlibat dalam GAM tidak mendapatkan pengakuan yang setara dalam perundingan damai yang berlangsung pada tahun 2005. Pimpinan GAM pada saat itu bahkan menyangkal keberadaan perempuan dalam gerakan, yang menunjukkan adanya diskriminasi gender yang mendalam.

Dalam konflik Aceh, perempuan tidak hanya menjadi korban, tetapi juga berperan sebagai pelaku aktif. Data menunjukkan bahwa sekitar 20% dari anggota GAM adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki peran yang signifikan dalam perjuangan tersebut (Siregar, 2015). Banyak perempuan yang bergabung dengan GAM karena dorongan situasi, mengikuti suami mereka, atau tergerak oleh penderitaan masyarakat akibat konflik. Dalam konteks ini, perempuan berfungsi sebagai penggerak perubahan, meskipun kontribusi mereka sering kali tidak diakui.

Namun, setelah perundingan damai, posisi perempuan kembali terpinggirkan. Mereka dipaksa untuk kembali ke peran tradisional sebagai anak, istri, dan ibu, yang mengakibatkan hilangnya ruang publik yang telah mereka raih selama konflik. Perempuan dibuat seolah-olah kembali ke posisi domestiknya mencerminkan pengabaian terhadap kontribusi perempuan selama konflik dan menunjukkan adanya konstruksi gender yang kuat di masyarakat Aceh. Masyarakat patriarkal yang telah ada sebelum konflik kembali menguat, dan perempuan diharapkan untuk kembali ke peran tradisional mereka.

Konstruksi gender yang ada di masyarakat Aceh berkontribusi terhadap marginalisasi perempuan pascakonflik. Masyarakat patriarkal yang mendominasi mengharuskan perempuan untuk kembali ke peran tradisional mereka. Hal ini mengakibatkan hilangnya pengakuan terhadap kontribusi mereka selama konflik. Enloe (2014) menekankan bahwa norma-norma gender yang ada sering menghambat partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam konteks politik maupun sosial. Dalam konteks Aceh, perempuan yang terlibat dalam GAM tidak mendapatkan pengakuan yang setara dalam proses perdamaian, yang menunjukkan adanya diskriminasi gender yang mendalam.

Moser (2001) juga menunjukkan bahwa marginalisasi perempuan dalam proses perdamaian dapat mengakibatkan hilangnya perspektif dan kebutuhan perempuan dalam pembangunan pascakonflik. Hal ini berpotensi menghambat upaya untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Dalam konteks Aceh, penting untuk mengakui kontribusi perempuan dalam proses perdamaian dan memastikan bahwa suara mereka didengar dalam pengambilan keputusan.

Kajian ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang signifikan dalam konflik, baik sebagai korban maupun sebagai agen perubahan. Meskipun kontribusi mereka sering kali tidak diakui, penting untuk memahami bagaimana konstruksi gender dan norma patriarkal berkontribusi terhadap marginalisasi perempuan dalam

konteks konflik. Dalam kasus Aceh, perempuan yang terlibat dalam GAM menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berfungsi sebagai pendukung, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam perjuangan. Namun, setelah konflik, mereka kembali terpinggirkan dalam proses perdamaian dan rekonstruksi.

Untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan, penting untuk mengakui kontribusi perempuan dan memastikan bahwa suara mereka didengar dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana perempuan dapat berjuang untuk mendapatkan kembali hak dan posisi mereka dalam masyarakat pascakonflik. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan dan perdamaian di Aceh.

Meneorikan Patriarki dan Peminggiran perempuan Eks Kombat di Aceh

Sylvia Walby adalah salah satu tokoh terkemuka dalam teori feminis yang memberikan analisis mendalam tentang konsep patriarki dalam bukunya, *Theorizing Patriarchy* (1990). Menurut Walby, patriarki adalah suatu sistem yang secara sistematis menempatkan perempuan dalam posisi subordinat melalui serangkaian struktur sosial yang berfokus pada kekuasaan laki-laki. Berbeda dengan analisis feminis sebelumnya yang memusatkan perhatian pada keluarga sebagai pusat patriarki, Walby mengembangkan pemahaman bahwa patriarki beroperasi dalam berbagai arena kehidupan sosial, termasuk di tempat kerja, negara, serta ranah budaya. Pandangan ini membawa perubahan signifikan dalam teori feminis dengan mengidentifikasi bahwa ketidaksetaraan gender terintegrasi dalam sistem sosial yang lebih luas (Walby, 1990).

Dalam karyanya, Walby mengidentifikasi bahwa patriarki dapat eksis secara simultan di berbagai ranah, yang membentuk apa yang disebutnya sebagai “patriarki publik” dan “patriarki privat.” Patriarki privat beroperasi terutama di dalam rumah tangga, dengan laki-laki mendominasi perempuan melalui peran domestik. Sementara itu, patriarki publik beroperasi melalui institusi sosial dan kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan di tempat kerja, negara, dan masyarakat luas. Teori Walby berupaya menunjukkan bahwa bahkan ketika perempuan berhasil memasuki ranah publik seperti dunia kerja atau politik, mereka tetap terjebak dalam sistem yang menempatkan mereka pada posisi inferior (Walby, 1990; Connell, 2005).

Walby menjelaskan patriarki dengan menguraikan enam struktur utama, yaitu: mode produksi di rumah tangga, relasi di tempat kerja, negara, kekerasan terhadap perempuan, relasi seksualitas, dan budaya. Keenam struktur ini menjadi kerangka analisis bagi Walby untuk menunjukkan bagaimana patriarki bekerja di setiap lapisan masyarakat, menciptakan ketidaksetaraan gender yang terlembaga. Misalnya, di tempat kerja, perempuan sering ditempatkan dalam posisi yang kurang bernilai atau bergaji lebih rendah daripada laki-laki. Negara berperan memperkuat patriarki melalui kebijakan yang secara implisit atau eksplisit mendukung dominasi laki-laki. Dalam ranah budaya, norma-norma gender memperkuat stereotip bahwa perempuan seharusnya berada di ranah domestik (Walby, 1990; Zarkov, 2007).

Aspek lain yang ditekankan Walby adalah bahwa patriarki mempertahankan dirinya melalui kekerasan simbolis dan fisik terhadap perempuan. Kekerasan ini berfungsi sebagai alat kontrol untuk menjaga agar perempuan tetap dalam posisi subordinat. Walby menekankan bahwa kekerasan bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan simbolis yang berupa stigma dan diskriminasi. Melalui relasi seksualitas, perempuan diharapkan memenuhi norma tertentu yang sering kali membatasi peran mereka dalam masyarakat. Budaya patriarkal ini mengonstruksi perempuan sesuai dengan norma yang mendukung dominasi laki-laki, dan setiap perempuan yang menyimpang dari konstruksi ini sering kali harus menerima sanksi sosial (Walby, 1990; Shepherd, 2010).

Analisis Teori Patriarki Walby dalam Kasus Eks Kombat Inong Bale di Aceh

Menggunakan kerangka patriarki Walby, dapat dianalisis bahwa perempuan eks kombat Inong Bale mengalami marginalisasi dan diskriminasi yang melembaga di masyarakat Aceh pascakonflik. Selama konflik, perempuan Aceh dalam kelompok Inong Bale berperan aktif sebagai kombat, sebuah peran yang sangat menyimpang dari norma budaya patriarkal yang menempatkan perempuan dalam peran domestik. Setelah konflik berakhir, stigma dan marginalisasi sosial ini muncul karena eks kombat perempuan dianggap melanggar norma gender tradisional

yang berlaku di Aceh. Sebagai contoh, banyak dari mereka mengalami kesulitan diterima kembali dalam peran tradisional seperti ibu rumah tangga atau istri, karena dianggap “tidak sesuai” dengan citra perempuan Aceh (Zarkov, 2007; lihat Walby, 1990).

Selain itu, pada tingkat kebijakan, negara dan lembaga-lembaga pascakonflik cenderung mengabaikan eks kombatan perempuan, lebih fokus pada pemulihan kombatan laki-laki. Hal ini sejalan dengan struktur patriarki yang digambarkan oleh Walby dalam ranah negara, di mana kebijakan publik sering kali memperkuat ketidaksetaraan gender dengan tidak memberikan dukungan yang setara untuk perempuan eks kombatan. Di tempat kerja, mereka juga mengalami diskriminasi ekonomi, di mana peluang kerja dan bantuan ekonomi cenderung tidak tersedia atau tidak memadai bagi eks kombatan perempuan. Diskriminasi ini menunjukkan bahwa struktur patriarki bekerja secara simultan di berbagai ranah kehidupan eks kombatan perempuan di Aceh, yang semakin memperkuat marginalisasi mereka (lihat Walby, 1990; Connell, 2005).

Kekerasan simbolis dalam bentuk stigma sosial yang dihadapi eks kombatan Inong Bale menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menghukum mereka secara sosial karena keterlibatan mereka sebagai kombatan. Diskriminasi ini semakin mengisolasi mereka dalam kehidupan sosial, membatasi akses mereka ke peluang pendidikan dan ekonomi, serta mengurangi partisipasi sosial mereka. Analisis ini menggarisbawahi bahwa teori patriarki Walby dapat memberikan kerangka analisis yang mendalam untuk memahami marginalisasi perempuan dalam konteks pascakonflik, khususnya dalam masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh norma-norma patriarkal.

Temuan dan Pembahasan

Hampir 20 tahun setelah penandatanganan Nota Kesepahaman di Helsinki (MoU Helsinki) yang mengakhiri gerakan separatis selama 30 tahun di Aceh, Indonesia, masih ada permasalahan yang belum terselesaikan mengenai keadilan, efektivitas, dan keberlanjutan program bantuan ekonomi pascakonflik, khususnya bantuan ekonomi pascakonflik kaitannya dengan perempuan. Tulisan ini mengeksplorasi sejauh mana bantuan ekonomi sejak MoU Helsinki ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia telah membantu atau menghambat kualitas hidup perempuan di Aceh, khususnya perempuan ex kombatan secara ekonomi dan politik.

Dalam analisis ini, penulis memanfaatkan pengamatan dan pengalaman penulis sebagai akademisi dan perempuan yang hidup di Aceh pada saat Aceh konflik berlangsung, dan juga menyaksikan perdamaian di Aceh. Sumber informasi penulis dapatkan melalui pembicaraan dan wawancara yang dilakukan dengan berbagai orang yang relevan dengan topik ini, dan dilengkapi dengan tinjauan pustaka. Peneliti memberikan konteks sejarah, budaya, dan politik yang diperlukan mengenai perempuan di Aceh untuk membahas secara spesifik diskriminasi dan marginalisasi yang dialami oleh perempuan mantan ex kombatan. Inti dari analisis penulis adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan perempuan eks kombatan. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang realitas kehidupan dan apa yang bisa mereka rasakan dan dapatkan pascakonflik yang terjadi selama hampir 30 tahun di Aceh. Untuk mendapatkan gambaran umum tentang diskriminasi dan marginalisasi perempuan ex kombatan, penulis mensituasikan artikel ini dalam konteks, konflik, perdamaian, dan syariat Islam di Aceh.

Konflik dan Latar Belakang Lahirnya Gerakan Aceh Merdeka

Aceh merupakan daerah yang unik dalam konteks Indonesia, baik dari segi sejarah, budaya, maupun identitasnya. Sebagai salah satu provinsi yang memiliki otonomi khusus, Aceh memiliki kekayaan sumber daya alam dan tradisi yang kaya, serta identitas budaya yang kuat. Namun, keunikan ini juga menjadi sumber ketegangan antara masyarakat Aceh dan pemerintah pusat. Ketidakpuasan yang mendalam terhadap perlakuan pemerintah, ditambah dengan faktor-faktor lain seperti ketidakadilan ekonomi, politik, dan identitas budaya, berkontribusi pada munculnya konflik yang berkepanjangan di daerah ini.

Ketidakpuasan ekonomi merupakan salah satu penyebab utama konflik di Aceh. Masyarakat Aceh merasa bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat yang adil dari sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak dan

gas. Meskipun Aceh merupakan salah satu penghasil minyak terbesar di Indonesia, sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan ini menciptakan rasa frustrasi yang mendalam di kalangan masyarakat Aceh, yang merasa diabaikan oleh pemerintah nasional (Siregar, 2015).

Sejak bergabung dengan Indonesia, Aceh memiliki sejarah panjang perjuangan untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar. Pemerintah nasional sering kali menerapkan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan lokal, seperti pengabaian terhadap budaya dan adat istiadat Aceh. Penolakan terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal ini semakin memperburuk ketegangan antara masyarakat Aceh dan pemerintah nasional. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan ini, dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak politik dan otonomi Aceh (Zainuddin, 2018).

Aceh memiliki identitas budaya dan agama yang kuat, yang bahkan sering bertentangan dengan kebijakan pemerintah nasional yang dianggap sekuler. Masyarakat Aceh, yang mayoritas beragama Islam, merasa bahwa identitas mereka terancam oleh kebijakan yang tidak menghormati nilai-nilai agama dan budaya lokal. Ketidakpuasan ini mendorong munculnya gerakan-gerakan yang memperjuangkan hak-hak masyarakat Aceh, termasuk GAM, yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap identitas Aceh sebagai bagian dari perjuangan mereka (Djalal, 2010).

Tindakan kekerasan dan represif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Aceh juga menjadi penyebab konflik. Operasi militer yang keras untuk menumpas GAM sering kali mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembunuhan. Tindakan ini tidak hanya memperburuk situasi, tetapi juga memicu lebih banyak dukungan terhadap GAM di kalangan masyarakat Aceh, yang melihat gerakan ini sebagai pembela hak-hak mereka (UN Women, 2015).

Dampak Konflik Bagi Masyarakat

Konflik berkepanjangan di Aceh menyebabkan kerusakan infrastruktur yang parah, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Hal ini menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Banyak petani kehilangan lahan pertanian mereka akibat kekerasan, dan banyak usaha kecil yang tutup karena kondisi yang tidak aman. Akibatnya, tingkat pengangguran meningkat, dan banyak keluarga terpaksa bergantung pada bantuan kemanusiaan (Djalal, 2010).

Konflik ini juga menyebabkan kehancuran struktur sosial dan keluarga. Banyak keluarga terpisah akibat kekerasan, dan banyak orang kehilangan anggota keluarga mereka. Trauma yang dialami oleh masyarakat Aceh, baik laki-laki maupun perempuan, menciptakan dampak jangka panjang yang sulit diatasi. Ketidakstabilan sosial ini mengakibatkan meningkatnya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah gangguan kesehatan mental di kalangan masyarakat (Siregar, 2015).

Selama konflik, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terjadi secara sistematis. Laki-laki sering kali menjadi target utama dalam operasi militer, di mana banyak yang ditangkap, disiksa, atau dibunuh. Namun, perempuan juga mengalami pelanggaran HAM yang sangat serius. Banyak perempuan menjadi korban kekerasan seksual, baik oleh aparat keamanan maupun oleh anggota GAM. Dalam banyak kasus, perempuan dipaksa untuk menjadi pengungsi, kehilangan rumah dan mata pencaharian mereka (UN Women, 2015). Pelanggaran ini menciptakan stigma sosial yang mendalam dan menghambat upaya rehabilitasi bagi korban.

Konflik yang berkepanjangan menghambat pembangunan jangka panjang di Aceh. Kondisi dan situasi tidak aman dan kondisi politik yang tidak menentu membuat investor enggan untuk berinvestasi di daerah tersebut. Selain itu, banyak sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dialihkan untuk biaya militer dan keamanan. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang pada gilirannya memperburuk kondisi kehidupan masyarakat Aceh (Zainuddin, 2018).

Konflik juga membawa perubahan peran gender di masyarakat Aceh. Banyak perempuan yang terpaksa mengambil peran sebagai kepala keluarga setelah kehilangan suami atau anggota keluarga lainnya akibat konflik. Meskipun ini memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi, mereka sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi. Selain itu, pengalaman trauma yang dialami oleh perempuan selama konflik juga diabaikan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi (Djalal, 2010).

Penyebab konflik di Aceh sangat kompleks, yang melibatkan faktor ekonomi, politik, identitas budaya, dan tindakan kekerasan. Dampak konflik yang berkepanjangan tidak hanya menghancurkan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga merusak struktur sosial dan keluarga, serta menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Memahami penyebab dan dampak konflik ini sangat penting untuk merumuskan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat Aceh.

Gender, Perempuan dan Konflik di Aceh

Perempuan memainkan peran yang signifikan dalam konteks konflik, baik sebagai korban maupun sebagai agen perubahan. Teori feminisme menekankan bahwa gender bukan hanya sekadar kategori sosial, tetapi juga merupakan faktor penting dalam memahami dinamika konflik. Dalam konteks Aceh, perempuan tidak hanya terpengaruh oleh konflik, tetapi juga berkontribusi dalam berbagai cara sebelum dan selama konflik berlangsung.

Sebelum konflik, perempuan di Aceh sering kali terlibat dalam kegiatan sosial dan ekonomi yang mendukung komunitas mereka. Mereka berperan sebagai pengelola rumah tangga, pendidik anak, dan pelestari budaya lokal. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, pada tahun 2000, sekitar 60% perempuan di Aceh terlibat dalam sektor pertanian dan perdagangan kecil, menunjukkan kontribusi mereka dalam perekonomian lokal (BPS Aceh, 2000).

Namun, ketika konflik berkepanjangan dimulai, peran ini berubah. Banyak perempuan yang terpaksa mengambil peran baru sebagai kepala keluarga setelah kehilangan suami atau anggota keluarga lainnya akibat kekerasan. Dalam situasi ini, perempuan menjadi lebih aktif dalam mencari nafkah dan berpartisipasi dalam gerakan sosial, termasuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Penelitian oleh Siregar (2015) menunjukkan bahwa perempuan di Aceh berperan penting dalam mendukung gerakan GAM, baik sebagai pengorganisasi maupun sebagai pendukung logistik.

Selama konflik, perempuan juga menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk kekerasan seksual dan pengungsian. Menurut laporan Human Rights Watch (2004), banyak perempuan di Aceh yang mengalami kekerasan seksual oleh aparat keamanan dan kelompok bersenjata. Namun, meskipun mereka mengalami trauma, banyak perempuan yang tetap berjuang untuk hak-hak mereka dan berkontribusi dalam upaya perdamaian. Mereka menjadi penghubung antara komunitas dan organisasi bantuan, serta berperan dalam proses rekonstruksi pascakonflik (Djalal, 2010).

Teori konflik dan gender menjelaskan bahwa perubahan peran perempuan selama konflik tidak selalu berlanjut setelah perdamaian dicapai. Ketika situasi kembali normal, norma-norma gender tradisional sering kali kembali mendominasi, mengakibatkan perempuan kembali ke peran yang lebih terbatas dalam masyarakat. Judith Butler, dalam penelitiannya di beberapa negara Afrika, menunjukkan bahwa meskipun konflik memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif, kondisi ini sering tidak bertahan setelah konflik berakhir. Ideologi gender yang ada tetap kuat dan menguat, dan perempuan dipaksa untuk kembali ke peran tradisional mereka, meskipun mereka telah menunjukkan kemampuan dan keberanian yang luar biasa selama konflik (Butler, 2004).

Butler berargumen, bahwa meskipun perempuan dapat memperoleh kekuatan dan visibilitas selama konflik, perubahan struktural yang mendalam dalam norma dan ideologi gender tidak terjadi. Oleh karena itu, meskipun perempuan di Aceh dan negara-negara lain mungkin mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian, tantangan untuk mempertahankan posisi mereka dalam masyarakat tetap ada. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam memahami peran perempuan dalam konflik dan pascakonflik. Selain itu, diperlukan upaya untuk mengubah norma-norma gender yang ada agar perempuan dapat terus berkontribusi secara aktif dalam pembangunan masyarakat.

Pasukan Inong Bale dan Konflik di Aceh

Pasukan Inong Bale, yang berarti "perempuan pejuang" dalam bahasa Aceh, muncul sebagai respons terhadap konflik bersenjata yang berkepanjangan di Aceh, terutama selama periode 1990-an hingga 2000-an. Pasukan ini dibentuk sebagai respons terhadap konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia, di

mana banyak perempuan merasa terdorong untuk berpartisipasi dalam perjuangan demi kemerdekaan dan keadilan. Ketika konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia meningkat, banyak perempuan di Aceh merasa terdorong untuk berpartisipasi dalam perjuangan demi kemerdekaan dan keadilan. Mereka tidak hanya menjadi korban kekerasan, tetapi juga ingin mengambil peran aktif dalam melawan penindasan dan memperjuangkan hak-hak mereka (Cockburn, 2019; Sjoberg & Gentry, 2020). Nama Inong Bale ini mencerminkan identitas dan peran perempuan dalam perjuangan. “Inong” berarti perempuan atau ibu, sedangkan “Bale” berarti pejuang atau yang berjuang. Pasukan Inong Bale terlibat dalam perang di berbagai daerah di Aceh, termasuk daerah-daerah yang menjadi basis kekuatan GAM, seperti Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Utara. Mereka terlibat dalam berbagai aktivitas, mulai dari pertempuran langsung hingga dukungan logistik dan pengumpulan informasi.

Selain berperan dalam konflik, anggota Inong Bale juga terlibat dalam komunitas mereka, sering kali berfungsi sebagai penghubung antara GAM dan masyarakat sipil. Mereka membantu dalam pengorganisasian masyarakat dan memberikan dukungan moral kepada keluarga yang terdampak konflik. Keberadaan mereka di garis depan menunjukkan bahwa perempuan dapat berperan dalam konteks yang biasanya didominasi oleh laki-laki, serta menantang norma-norma gender tradisional.

Inong Bale dibentuk sebagai unit militer yang terdiri dari perempuan yang berjuang di garis depan. Mereka dilatih untuk menjadi pejuang bersenjata dan berpartisipasi dalam operasi militer GAM. Munculnya pasukan ini juga mencerminkan perubahan dalam norma gender, di mana perempuan mulai mengambil peran yang lebih aktif dalam konflik, yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki (Zalewski, 2021).

Pasukan Inong Bale memiliki posisi strategis dalam struktur GAM. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pejuang, tetapi juga sebagai simbol perlawanan perempuan dalam konflik. Dalam banyak kasus, mereka terlibat dalam pengumpulan informasi, logistik, dan dukungan moral bagi pasukan GAM lainnya. Pelatihan yang mereka terima mencakup taktik militer, penggunaan senjata, dan strategi bertahan hidup di medan perang (Mackenzie, 2018).

Menurut data yang dikumpulkan oleh organisasi non-pemerintah, jumlah anggota Inong Bale diperkirakan mencapai sekitar 1.000 hingga 2.000 perempuan selama puncak konflik. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pelajar, ibu rumah tangga, dan pekerja. Pembagian peran di antara mereka bervariasi, dari mulai, perempuan yang berfokus pada pertempuran langsung. Sementara yang lain terlibat dalam peran pendukung seperti pengobatan dan pengelolaan logistik.

Diskriminasi dan Marginalisasi Inong Bale dalam Perdamaian Aceh

Setelah perjanjian damai Helsinki pada tahun 2005, yang mengakhiri konflik bersenjata di Aceh, banyak anggota Inong Bale menghadapi tantangan besar dalam reintegrasi dalam masyarakat. Meskipun mereka telah berjuang di garis depan, banyak dari mereka yang mengalami diskriminasi dan marginalisasi. Norma-norma gender tradisional yang kuat di Aceh sering kali menganggap perempuan sebagai makhluk yang harus berada di belakang yang mengakibatkan pengabaian terhadap kontribusi mereka selama konflik (Enloe, 2020).

Banyak anggota Inong Bale yang merasa tidak diakui dalam proses perdamaian dan rekonstruksi. Mereka tidak mendapatkan akses yang sama terhadap program rehabilitasi dan dukungan yang diberikan kepada mantan pejuang laki-laki. Penelitian oleh Djalal (2010) menunjukkan bahwa banyak perempuan yang terlibat dalam Inong Bale merasa terpinggirkan dalam diskusi tentang pembangunan dan pemulihan pascakonflik, meskipun mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berharga.

Selain itu, stigma sosial yang dilekatkan pada perempuan yang terlibat dalam konflik membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan berintegrasi dalam masyarakat. Banyak dari mereka yang mengalami kesulitan untuk membangun kembali kehidupan mereka setelah konflik. Bahkan beberapa di antaranya bahkan menghadapi kekerasan domestik dan penolakan dari komunitas mereka.

Pasukan Inong Bale merupakan contoh penting dari peran perempuan dalam konflik di Aceh. Meskipun mereka telah menunjukkan keberanian dan kontribusi yang signifikan selama konflik, mereka masih mendapatkan tantangan untuk diakui dan dihargai dalam proses perdamaian. Diskriminasi dan marginalisasi yang mereka

alami menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap hak-hak perempuan dalam konteks pascakonflik, serta pentingnya mengubah norma-norma gender yang ada agar perempuan dapat berkontribusi secara penuh dalam pembangunan masyarakat Aceh yang damai dan berkelanjutan (Butler, 2020; Mackenzie, 2018).

Perempuan kombatan di Aceh yang terlibat dalam konflik bersenjata menghadapi tantangan signifikan dalam proses reintegrasi pascakonflik. Diskriminasi dan marginalisasi yang mereka alami menciptakan hambatan yang menghalangi mereka untuk berkontribusi secara penuh dalam pembangunan masyarakat. Berbagai faktor berkontribusi terhadap situasi ini, seperti program perlucutan senjata, *disarmament*, *demobilization*, and *reintegration* (DDR), stigma sosial, dan kurangnya pengakuan terhadap kontribusi mereka.

Program DDR yang Tidak Memadai

Program DDR di Aceh sering mengalami kegagalan dalam memenuhi kebutuhan unik perempuan kombatan. Sebagian besar program ini lebih fokus pada peran gender tradisional, seperti mencari suami atau mengajarkan keterampilan menjahit, daripada memberdayakan perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan atau terlibat dalam kegiatan ekonomi yang bermakna. Menurut laporan dari UN Women (2015), hanya 10% dari peserta program DDR di Aceh yang notabene perempuan. Bahkan banyak dari mereka merasa bahwa program tersebut tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dalam program-program tersebut.

Membungkam Suara Perempuan

Narasi yang dibangun oleh aktor internasional, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan akademisi sering membungkam beragam pengalaman perempuan kombatan. Penelitian oleh Sjoberg dan Gentry (2020) menunjukkan banyak laporan tentang perempuan dalam konflik lebih menekankan pada peran mereka sebagai korban daripada sebagai agen perubahan. Pembungkaman ini mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap isu-isu seperti ketidakadilan sosial dan penindasan yang dihadapi perempuan, yang seharusnya menjadi bagian dari narasi pembangunan perdamaian.

Kurangnya Pengakuan dan Tantangan Reintegrasi

Kontribusi perempuan kombatan sering kali dipinggirkan pascakonflik. Laporan dari International Crisis Group (2017) mencatat perempuan yang terlibat dalam konflik di Aceh sering kali tidak diakui dalam proses rekonstruksi, dan kebutuhan mereka tidak terpenuhi dalam kebijakan pascakonflik. Selain itu, mantan gerilyawan perempuan menghadapi tantangan khusus selama reintegrasi. Penelitian oleh Mackenzie (2018) menunjukkan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam membangun kembali hubungan sosial dan ekonomi setelah konflik, yang semakin memperburuk posisi mereka dalam masyarakat.

Hambatan Sosial dan Ekonomi

Perempuan pengungsi internal di Aceh juga menghadapi hambatan signifikan, seperti hilangnya mata pencaharian dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Menurut laporan dari Human Rights Watch (2019), perempuan di Aceh mengalami peningkatan risiko kekerasan berbasis gender, dengan 60% dari mereka melaporkan mengalami kekerasan setelah konflik. Hambatan-hambatan ini memperburuk kondisi marginalisasi dan diskriminasi yang mereka alami.

Partisipasi Terbatas dalam Pembangunan Perdamaian

Meskipun memiliki peran historis sebagai kombatan dan agen dalam pembangunan perdamaian, perempuan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan pascakonflik. Laporan dari UNDP (2020) menunjukkan hanya 5% perempuan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan pascakonflik di Aceh. Ketidakterlibatan ini mengakibatkan kebijakan yang tidak sensitif gender dan tidak memenuhi kebutuhan perempuan, sehingga memperkuat kesenjangan berbasis gender dalam masyarakat.



Kesimpulan

Diskriminasi dan marginalisasi yang dialami perempuan kombatan di Aceh pascakonflik mencerminkan tantangan yang kompleks dalam upaya mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Meskipun perempuan memiliki peran penting dalam konflik dan proses pembangunan perdamaian, mereka nyatanya diabaikan dalam program-program reintegrasi dan pengambilan keputusan. Hambatan sosial dan ekonomi, serta stigma yang melekat pada pengalaman mereka, semakin memperburuk posisi mereka dalam masyarakat.

Penting untuk mengakui kontribusi perempuan dalam konflik dan memastikan bahwa kebutuhan serta perspektif mereka diintegrasikan dalam kebijakan pascakonflik. Dengan memberdayakan perempuan dan memberikan akses yang setara terhadap sumber daya dan kesempatan, masyarakat Aceh dapat bergerak menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Mengatasi diskriminasi ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan perempuan, tetapi juga akan memperkuat fondasi perdamaian dan keadilan sosial di Aceh.

Rekomendasi

1. *Pemberdayaan Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan*: Mendorong partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal dan nasional. Ini dapat dilakukan dengan menciptakan platform yang memungkinkan perempuan untuk menyuarakan pendapat dan berkontribusi dalam kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.
2. *Kampanye Kesadaran dan Pendidikan*: Melaksanakan kampanye kesadaran untuk mengubah stigma sosial terhadap perempuan kombatan. Pendidikan masyarakat tentang peran perempuan dalam konflik dan pentingnya inklusi gender dalam pembangunan perdamaian dapat membantu mengurangi diskriminasi.
3. *Akses terhadap Layanan Kesehatan dan Dukungan Sosial*: Memastikan perempuan kombatan memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, serta dukungan sosial yang diperlukan untuk membantu mereka berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan perempuan kombatan di Aceh dapat memperoleh pengakuan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk berkontribusi secara penuh dalam pembangunan masyarakat yang lebih adil dan setara.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh. (2000). *Statistik Aceh 2000*. Banda Aceh: BPS Aceh.
- Butler, J. (2004). *Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence*. London: Verso.
- Butler, J. (2020). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge.
- Cockburn, C. (2007). *From Where We Stand: War, Women's Activism and Feminist Analysis*. Zed Books.
- Cockburn, C. (2019). Gender, Armed Conflict and Political Violence. *International Feminist Journal of Politics*, 21(1), 1-20.
- Connell, R.W. (2005). *Masculinities*. University of California Press.
- Djalal, A. (2010). Perempuan dan Konflik: Studi Kasus Aceh. *Jurnal Perempuan*, 15(2), 45-60.
- Enloe, C. (2014). *The Big Push: Exposing and Challenging Persistent Patriarchy*. University of California Press.
- Human Rights Watch. (2004). *Aceh: A Long Way to Go*. New York: Human Rights Watch.
- Mackenzie, M. (2018). Gender, Peace and Security: A Critical Survey. *International Affairs*, 94(1), 1-18.
- Moser, C. (2001). The Gendered Impact of Conflict: The Importance of Gender in Conflict Resolution. *Gender and Development*, 9(3), 12-20.



- Siregar, E. (2015). Peran Perempuan dalam Gerakan Aceh Merdeka. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(1), 23-35.
- Shepherd, L.J. (2010). *Gender Matters in Global Politics: A Feminist Introduction to International Relations*. Routledge.
- Sjoberg, L., & Gentry, C.E. (2020). Women, Gender, and Terrorism: A New Perspective. *Journal of Global Security Studies*, 5(2), 234-250.
- UN Women. (2015). *Women, Peace and Security: The Role of Women in Conflict Resolution and Peacebuilding*. New York: United Nations.
- Walby, S. (1990). *Theorizing Patriarchy*. Basil Blackwell.
- Zainuddin, M. (2018). Konstruksi Gender Pascakonflik di Aceh. *Jurnal Gender dan Pembangunan*, 6(1), 12-25.
- Zalewski, M. (2021). Feminist International Relations: A Critical Approach. *Review of International Studies*, 47(3), 345-362.
- Zarkov, D. (2007). *The Body of War: Media, Ethnicity, and Gender in the Break-up of Yugoslavia*. Duke University Press.

